

# Implementasi Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) dalam Upaya Pencegahan Resiko Stunting Sejak Tahap PraNikah di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Istiqomah Delia Nanda, Ilmi Usrotin Choiriyah\*

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i3.5937>

\*Correspondence: Ilmi Usrotin Choiriyah

Email: [ilmiusrotin@umsida.ac.id](mailto:ilmiusrotin@umsida.ac.id)

Received: 29-04-2026

Accepted: 09-05-2026

Published: 13-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *The Elsimil (Electronic Ready for Marriage and Pregnancy) application is a digital innovation developed by the National Population and Family Planning Board (BKKBN) to prevent stunting since the premarital period through health screening, education, and mentoring for prospective brides and grooms. This study aims to analyze the implementation of the Electronic Ready for Marriage and Pregnancy (ELSIMIL) Application in efforts to prevent the risk of stunting since the premarital stage in Sidorejo Village, Krian District, Sidoarjo Regency. This study uses a descriptive qualitative approach. Data were obtained through three data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. This study was analyzed with Edward III's policy implementation theory with four indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study on the implementation of the ELSIMIL application in efforts to prevent the risk of stunting since the premarital stage in Sidorejo Village, Krian District, Sidoarjo Regency have been implemented, but there are still obstacles such as differences in understanding, non-uniform delivery of information, and instructions that sometimes change among implementers in the field, technical obstacles originating from limited internet networks. Therefore, improving network infrastructure and ongoing training for TPK cadres, as well as strengthening cross-sector coordination, are necessary to maximize the effectiveness of the Elsimil*

*application in efforts to prevent the risk of stunting.*

**Keywords:** *Implementation; Electronic Ready For Marriage And Pregnancy Program; (ELSIMIL)*

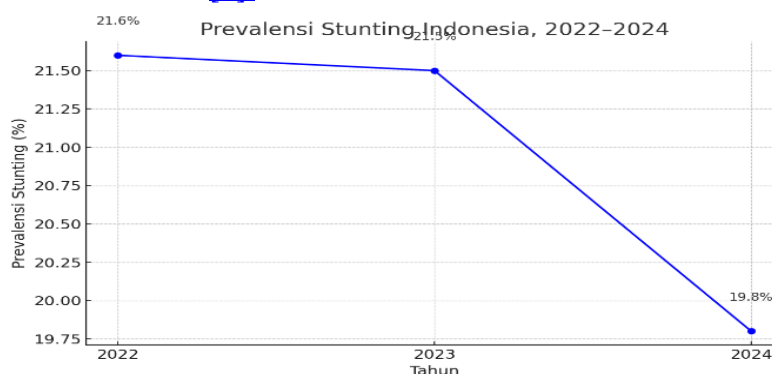
**Abstrak:** Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh BKKBN untuk mencegah Stunting Sejak masa pranikah melalui skrining kesehatan, edukasi, serta pendampingan calon pengantin. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Elektronik Siap Nikah Dan Hamil (ELSIMIL) dalam upaya pencegahan resiko stunting sejak tahap pranikah di Desa Sidorejo Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data didapatkan melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan teori implementasi kebijakan Edward III dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian tentang implementasi aplikasi ELSIMIL dalam upaya pencegahan resiko stunting sejak tahap pranikah di Desa Sidorejo Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo ini telah dilaksanakan, namun masih terdapat kendala seperti adanya perbedaan pemahaman, penyampaian informasi yang tidak seragam, serta instruksi yang kadang berubah-ubah di antara pelaksana di lapangan, hambatan teknis yang bersumber dari keterbatasan jaringan internet. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur jaringan dan pelatihan berkelanjutan bagi kader TPK serta memperkuat koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memaksimalkan efektivitas aplikasi Elsimil dalam upaya pencegahan risiko stunting.

**Kata Kunci:** Implementasi; Program Elektronik Siap Nikah Dan Hamil; (ELSIMIL)

## Pendahuluan

Pelayanan kesehatan yang berkualitas yakni layanan yang memenuhi tuntutan, standar, dan cita-cita masyarakat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), layanan kesehatan mencakup semua upaya yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan, dan mencegah penyakit, selain memberikan perawatan dan rehabilitasi komunitas [1]. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif hanyalah beberapa kualitas yang dicakup oleh layanan kesehatan. Menurut UU No. 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan, ditegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara setara, karena kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia [2]. Selain itu, setiap penduduk Indonesia berhak atas layanan kesehatan yang terjamin dari sisi keamanan, mutu, dan keterjangkauannya melalui UU No. 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan [3]. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan solusi nyata yang mampu meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi elektronik.

Stunting pada balita merupakan salah satu isu kesehatan yang menjadi bagian dari permasalahan publik di Indonesia. Menurut laporan *Global Nutrition Report* (2016), Dari 132 negara, Indonesia berada di peringkat ke-108 dalam hal prevalensi stunting [4]. Stunting tetap menjadi tantangan besar dalam bidang kesehatan masyarakat, dan agenda perbaikan gizi global telah menjadikannya prioritas utama hingga tahun 2025. Sekarang ini, stunting menjadi satu dari banyak persoalan serius yang tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi masalah nasional yang dapat menyebabkan hilangnya generasi (*lost generation*) dan menimbulkan beban yang semakin berat apabila tidak segera ditangani [5]. Perpres No. 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting menegaskan bahwa sasaran RPJMN adalah membuat penurunan angka stunting menjadi 14,2% pada tahun 2029 [6].



**Gambar 1.** Prevelensi Angka Stunting Indonesia 2022-2024

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia

Berlandaskan Grambar 1. hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kementerian Kesehatan, secara keseluruhan, percepatan penanganan stunting telah menurunkan prevalensi sebesar 9,3%, atau rata-rata penurunan tahunan sebesar 1,85% [7]. Meski demikian, angka stunting saat ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan hingga akhir tahun 2024. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga mencapai 14,2% pada tahun 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, dibutuhkan kolaborasi lintas

sektor, mencakup pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan peran aktif masyarakat.

Beragam program dan kebijakan telah digulirkan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi stunting di Indonesia. Realisasi kebijakan pemerintah melalui *E-government* menjadi salah satu strategi penting dalam percepatan penanggulangan stunting di Indonesia. *E-government* sistem yang diterapkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan perangkat elektronik, terutama teknologi informasi dan internet, untuk meningkatkan efisiensi kerja aparatur negara serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Gambaran *E-government* mulai dikenalkan di Indonesia tahun 2001 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) kemajuan telematika dan sains yakni peluang dalam menyatukan negara dan memberdayakan warganya guna mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan [8]. Kemudian, sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi dalam prosedur pemerintahan (*e-government*) hendak menaikkan tingkat Keberhasilan, kapasitas, tanggung jawab, serta keterbukaan pada tata kelola pemerintahan [9]. Upaya pemerintah dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan tercermin dalam penerapan *e-government*. Dalam ranah kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, implementasi *e-government* terwujud melalui inovasi digital berupa aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Aplikasi ini merepresentasikan transformasi digital dalam sektor pelayanan publik, khususnya dalam mendukung percepatan program penurunan stunting melalui sistem pemantauan calon pengantin dan ibu hamil berbasis digital. Penerapan Elsimil di Desa Sidorejo memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas pelayanan publik serta optimalisasi proses pendampingan keluarga. Pendataan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini menjadi lebih efisien, akurat, dan terintegrasi dengan sistem informasi BKKBN. Dengan demikian, Elsimil tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendataan, tetapi juga berperan sebagai media komunikasi, edukasi, dan pengawasan terpadu yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tenaga pendamping, dan masyarakat.

Menyadari pentingnya intervensi pemerintah untuk mencegah generasi mendatang dari risiko stunting, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpres No. 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan regulasi tersebut, BKKBN ditunjuk sebagai penggerak utama pada pelaksanaan percepatan penurunan stunting di lapangan. BKKBN RI mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 yang memuat Rencana Aksi Nasional Percepatan Penanggulangan Stunting (RAN-PASTI) periode 2021–2024 sebagai tindakan lanjut. Dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, rencana ini menjadi pedoman koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga desa, serta para pemangku kepentingan terkait [11]. BKKBN telah mengembangkan aplikasi sebagai salah satu langkah untuk menurunkan angka stunting yakni Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Intervensi Pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, bahkan sejak tahap perencanaan pernikahan. Sebab, risiko stunting telah muncul sejak masa kehamilan, sehingga calon orang tua perlu

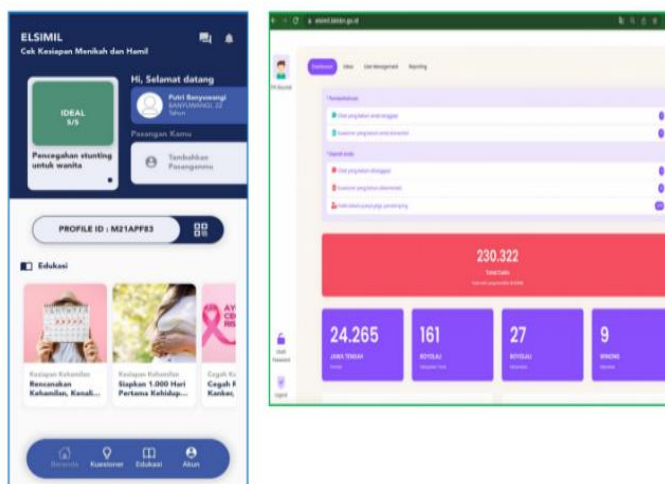
memiliki kondisi kesehatan yang baik. Untuk itu, dibutuhkan instrumen pemantauan kesehatan bagi calon pengantin (catin). Apabila melalui instrumen tersebut ditemukan catin dengan kondisi kesehatan yang belum sesuai standar, intervensi dapat segera dilakukan melalui pembimbingan petugas BKKBN yang terkoneksi dengan anggota kader PKK maupun bidan. Berikut yakni data jumlah catin beserta data jumlah pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga setiap tahunnya di Desa sidorejo.

**Tabel 1.** Jumlah Calon Pengantin (Catin) Desa Sidorejo dan Jumlah Pengantin Teregister Tahun 2022-2025

Tahun	Jumlah Calon Pengantin Desa Sidorejo	Jumlah Calon Pengantin Teregister (Elsimil)	Presentase Teregister
2022	48	0	0%
2023	53	0	0%
2024	121	15	12,4%
2025	78	10	12,8%

Sumber: Penyuluh KB Kecamatan Krian dan Desa Sidorejo

Berdasarkan Tabel 1. data jumlah calon pengantin (Catin) di Desa Sidorejo periode 2022–2025 menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Elsimil mulai berjalan secara efektif pada tahun 2024. Pada tahun 2022 hingga 2023 terjadi peningkatan jumlah calon pengantin, dengan total 48 pasangan pada tahun 2022. Namun, hingga tahun 2023 belum terdapat calon pengantin yang terdaftar dalam aplikasi, menandakan bahwa Elsimil belum diimplementasikan secara operasional di tingkat desa. Mulai tahun 2024, tercatat sebanyak 15 dari 121 calon pengantin (12,4%) telah melakukan registrasi melalui aplikasi, sedangkan pada tahun 2025 jumlah tersebut menjadi 10 dari 78 calon pengantin (12,8%). Meskipun proporsinya masih relatif kecil, hal ini memperlihatkan realitas eskalasi pemahaman dan ketrampilan adaptasi penduduk terhadap pemanfaatan Elsimil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Elsimil di Desa Sidorejo masih berada pada tahap awal dan memerlukan peningkatan sosialisasi serta pendampingan agar pelaksanaannya lebih optimal.



**Gambar 2.** Tampilan Aplikasi ELSIMIL Catin Dan TPK  
 Sumber: Modul Aplikasi Elsimil

Pada gambar 2. merupakan tampilan aplikasi ELSIMIL yang saat ini sedang dikembangkan, terbagi menjadi dua versi, yakni untuk calon pengantin (Catin) dan untuk Tim Pendamping Keluarga. Versi mobile diperuntukkan bagi Catin dan dapat diunduh melalui Playstore pada perangkat Android. Setelah aplikasi terinstal pada perangkat telekomunikasi yang dimiliki oleh catin, langkah berikutnya adalah dengan mendaftarkan diri/ registrasi akun. Terdapat beberapa fitur yang harus diperhatikan oleh catin yang pertama melakukan pengisian kuesioner. Catin harus mengisi kuisisioner sesuai dengan hasil pemeriksaan dari faskes. Setelah mengisi kuisisioner akan muncul Skoring otomatis digunakan untuk mengkategorikan hasil kuisisioner catin menjadi ideal (ditandai warna hijau) atau berisiko (ditandai warna merah). *Ouput* ini menjadi acuan oleh petugas pendamping dalam memberikan bimbingan kepada catin. Pembaharuan angket ini bisa dilaksanakan setelah calon pengantin (catin) berhasil memperbaiki kualitas kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan ulang di Faskes. Pada aplikasi ini juga terdapat File Edukasi. Dimana akan terdapat Skor, Penjelasan dan Materi Edukasi di masing-masing jawaban yang diberikan oleh Catin. Fitur Edukasi menyediakan beragam informasi terkait persiapan pernikahan dan kehamilan. Fitur ELSIMIL yang juga penting adalah fitur chat. Fitur chat pada aplikasi ELSIMIL memungkinkan calon pengantin untuk berkonsultasi secara online dengan petugas pendamping, sehingga keluhan dan pertanyaan dapat disampaikan dan ditanggapi melalui saran serta masukan yang relevan. Selain itu terdapat fitur untuk menambahkan pasangan pada menu Akun Tambah Pasangan. Pendataan angket pada aplikasi menghasilkan Surat Keterangan atau Sertifikat ELSIMIL, yang berfungsi sebagai satu dari banyak dokumen administrasi guna pendaftaran pernikahan di KUA atau Dukcapil.

Sementara itu, versi berbasis web ditujukan untuk tenaga pendamping, yang meliputi anggota Kader KB, anggota Kader PKK, dan Bidan. Website dapat diakses via tautan yang telah disediakan <https://elsimil.bkkbn.go.id>. Untuk memanfaatkan aplikasi ELSIMIL, TPK yang telah ditetapkan perlu menyiapkan beberapa hal yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keputusan (SK) Penunjukan sebagai Tim pendamping Keluarga (TPK), Sertifikat Pelatihan/ Orientasi Pendampingan Keluarga / Pelatihan Program Bangsa Kencana yang pernah diikuti serta nomor telepon dan alamat email (optional). Aplikasi ELSIMIL berfungsi sebagai sarana pendampingan yang dilakukan oleh TPK kepada calon pengantin (Catin). Setiap calon akan memperoleh dampingan dari TPK yang terdiri atas Kader KB, Kader PKK, serta bidan atau petugas kesehatan di desa/kelurahan setempat. Proses pendampingan diawali dengan pemilihan Catin oleh Kader KB. Setelah konfirmasi, tautan (link) pendampingan ditempelkan ke dalam grup WhatsApp yang beranggotakan Kader PKK dan bidan/tenaga kesehatan. Selanjutnya, anggota TPK yang telah masuk/login ke aplikasi ELSIMIL cukup mengklik tautan tersebut untuk diarahkan langsung ke halaman pendampingan Catin. Terdapat 3 fitur utama pada Elsimil untuk Tim pendamping yakni yang pertama untuk pembuatan list pertanyaan modul, artikel edukasi, serta halaman approval. TPPS Desa/Kelurahan merupakan bagian dari struktur kelembagaan dalam rancangan gerakan akselerasi pengurangan prevalensi stunting nasional kini memiliki peran untuk mengkoordinasikan, menyinergikan, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan akselerasi pengurangan stunting pada jenjang daerah.

Aplikasi Elsimil berupaya untuk mencegah stunting dengan skrining yang dilanjutkan dengan pembimbingan kesiapan menikah dan hamil bagi calon pasangan. Proses pemindaian kesehatan ini berfokus pada berbagai indikator yang menjadi faktor penentu stunting, yang kemudian menghasilkan keluaran berupa sertifikat atau kartu yang berisi pernyataan calon pasangan tersebut memiliki risiko atau tidak untuk melahirkan bayi stunting. Bukti ini nantinya akan menjadi syarat dalam pengajuan pernikahan di KUA/Disdukcapil. Hasil pemindaian juga menjadi input bagi petugas untuk mengambil tindakan lanjut dalam proses pendampingan. BKKBN melalui Direktorat Bina Ketahanan Remaja menghadirkan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai media untuk pemantauan sekaligus pendampingan guna menjamin kesiapan calon pengantin dalam pernikahan dan kehamilan. Pada sebuah instansi pemerintahan, pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan edukasi sekaligus menghimpun data dari para pengguna. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam mendukung upaya pembangunan sumber daya manusia. Secara khusus, aplikasi Elsimil dirancang untuk memantau kesiapan calon pengantin sejak dini, terutama terkait risiko kesehatan yang dapat memengaruhi kemungkinan kelahiran bayi, dengan meninjau kondisi kesehatan masing-masing pasangan. Secara sederhana, BKKBN berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi pencegahan stunting melalui perhatian pada kesehatan calon pengantin sebelum pernikahan. Namun berdasarkan observasi peneliti, Implementasi aplikasi ELSIMIL pada masyarakat serta petugas pendamping dan [Petugas Lapangan Keluarga Berencana](#) (PLKB) dirasakan belum maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa kendala diantaranya yang pertama, masih terjadi eror dalam penggunaan aplikasi ELSIMIL pada petugas pendamping sehingga PLKB mengalami kesulitan dalam menginput data. Kemudian yang kedua dalam hal Komunikasi, masih kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya aplikasi ELSIMIL pada catin sehingga terjadi selisih jumlah yang cukup jauh pada data jumlah catin yang tergister dengan jumlah catin di desa sidorejo. Untuk melihat strategi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting pada studi ini menerapkan teori dari George C Edward III. George C Edward III (1980) dalam Turhindayani dan Halim (2020) menyatakan bahwa kesuksesan penerapan *e-government* sangat bergantung pada kejelasan komunikasi yakni bagaimana pesan kebijakan disampaikan kepada pelaksana maupun masyarakat, kecukupan sumber daya yang meliputi meliputi SDM (tenaga pelaksana), dana, sarana, dan prasarana yang mendukung, sikap pelaksana yang mendukung yakni sejauh mana sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana mendukung keberhasilan program, dan struktur birokrasi yang efisien yaitu aturan, mekanisme, dan koordinasi antar lembaga yang menjadi jalur pelaksanaan kebijakan [\[10\]](#). Tanpa keempat faktor ini, potensi aplikasi digital dalam meningkatkan pelayanan publik tidak akan tercapai secara optimal.

Beberapa kajian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam penyajian studi ini diantaranya adalah dalam penelitian yang dikerjakan oleh Septiyani dkk (2023) [\[12\]](#) dengan judul “ Evaluasi Efektivitas Sosialisasi Aplikasi Elsimil di Kota Metro” beberapa masalah teridentifikasi selama penilaian efektivitas program penjangkauan aplikasi Elsimil di Metro City. Sebagian besar warga belum pernah mendengar atau menggunakan aplikasi tersebut, dan banyak yang bahkan belum pernah berpartisipasi dalam penjangkauan apa pun terkait

aplikasi tersebut. Hal ini menekankan betapa pentingnya upaya lebih besar untuk memberi tahu calon pengantin tentang kegunaan dan manfaat aplikasi, serta bagaimana aplikasi ini dapat membantu menurunkan angka kasus stunting. Penelitian kedua dilakukan oleh Yunita dkk (2025) dengan judul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong” [13]. Koneksi internet yang sering tidak stabil menjadi kendala, mengingat Aplikasi Elsimil beroperasi secara online dan memerlukan jaringan internet yang kuat. Aplikasi ini juga rentan mengalami kesalahan jika banyak pengguna mengaksesnya secara bersamaan, sehingga menghambat proses penginputan data. (Sumber: Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pugaan). Ketiga, penelitian dilakukan oleh Choiriyah (2020) dengan judul “Penerapan *E-government* Melalui M-Bonk Di Kabupaten Sidoarjo” [14]. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Sidoarjo yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan diantaranya wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan triangulasi. Pengembangan *e-government* di Indonesia dapat ditempuh melalui perencanaan yang realistis dan terukur. Perencanaan ini dilaksanakan secara bertahap, yaitu dimulai dari tahap persiapan berupa pembuatan situs informasi pada setiap lembaga, kemudian berlanjut ke tahap pematangan hingga tahap pemantapan. Hasil kajian tersebut menyatakan implementasi *e-government* melalui aplikasi M-Bonk di Kabupaten Sidoarjo saat ini konsisten berada pada tahap persiapan dan pematangan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia sebagai operator aplikasi, kurangnya tenaga lapangan untuk menindaklanjuti perbaikan jalan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, minimnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi, serta perkembangan penerapan M-Bonk yang masih pada tahap awal. Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aplikasi Elsimil berperan dalam edukasi dan pendampingan calon pengantin untuk mencegah stunting. Namun, keduanya lebih menyoroti efektivitas sosialisasi, bukan implementasinya di tingkat desa. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi aplikasi Elsimil dalam pencegahan risiko stunting sejak tahap pranikah di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar hal tersebut, maka penulis mengangkat judul penelitian tertulis dalam judul “Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Dan Hamil (ELSIMIL) di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.”

### Metode Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan aplikasi ELSIMIL dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penulisan kualitatif adalah penulisan yang bertujuan memahami kejadian yang terjadi pada subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan secara luas, dengan menggambarkannya melalui kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah [15]. Lokasi penelitian di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Sumber data diperoleh dari sumber data primer atau data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan data sekunder atau data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik purposive sampling dipilih dalam mendapatkan informan yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang isu tersebut dan dapat memberikan data yang relevan. Informan yang terlibat yakni Kader PKK dan Posyandu di Desa Sidorejo, Penyuluh KB di Kecamatan Krian. Analisis data dalam studi ini dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang dirumuskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana [16]. Proses ini mencakup tiga alur kegiatan yang simultan yaitu (1) Kondensasi Data (*Data Condensation*), yakni tahap menyaring, memusatkan perhatian, mereduksi, serta merumuskan data awal yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen; (2) Penyajian Data (*Data Display*), yakni memperlihatkan data yang sudah melalui proses kondensasi dalam bentuk uraian terstruktur, tabel matriks, maupun diagram, sehingga lebih mudah dipahami serta memudahkan dalam melihat keterkaitan antar data; dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*) yaitu berupa pengambilan simpulan sementara melalui data yang telah ditampilkan, yang selanjutnya diverifikasi secara terus-menerus dengan data baru hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel. Seluruh data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan menggunakan lensa teori implementasi kebijakan George C. Edward III untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis.

## Hasil dan Pembahasan

Peneliti menganalisis implementasi aplikasi ELSIMIL guna mencegah risiko stunting sejak masa pra-nikah berdasarkan teori Edward III. Implementasi tersebut melibatkan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, alokasi sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi.

### Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur vital pada sebuah lembaga yang memfasilitasi kepala serta karyawan dalam melakukan tugas secara efektif serta berdaya guna untuk meraih sasaran lembaga. Demi mencapai efektivitas, pesan komunikasi harus disampaikan secara jelas agar mudah dipahami. Secara fungsional, komunikasi berperan menyatukan beragam informasi yang diterima serta memperluas wawasan mengenai aspek-aspek yang sebelumnya belum diketahui. Proses ini melibatkan pengiriman informasi dari komunikator kepada penerima. Menurut Edward III, informasi terkait kebijakan publik wajib disampaikan kepada para pemangku kepentingan, sehingga mereka mampu mempersiapkan dan menjalankan kebijakan secara optimal, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan serta target kebijakan. George Edward III juga menguraikan sub-indikator utama dalam komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan, guna menjamin pelaksanaan kebijakan selaras dengan ekspektasi.

Pertama, dalam mekanisme penyampaian komunikasi yang efektif, signifikan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan diinformasikan pada pemangku kepentingan sebelum pelaksanaan. Penyampaian semacam ini bersifat searah, yakni melalui pihak pengirim pembentuk kebijakan pada pelaksananya. Dimensi transmisi mengharuskan bahwa peraturan publik tidak hanya dikomunikasikan kepada implementor kebijakan, tapi juga harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran kebijakan serta berbagai pihak terkait,

baik yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Penyuluh KB Kecamatan Krian mengatakan :

*“Jadi kita mulai 2021 itu mulai pengenalan kick of nya terkait dengan elsimil ini kita sudah melakukan pelatihan dan juga sosialisasi workshop juga iya jadi tiap tahun kita pelaksanaan tahun 2021 hingga sekarang tahun 2025 kemudian kita dilingkup kecamatan krian itu pelaksanaannya pelatihan ini kita buat menjadi 5 titik jadi kita pelatihannya saya mix beberapa desa atau kelurahan kita jadikan satu menjadi ada 5 titik jadi tiap titik itu kurang lebih biasane 3 sampe 4 desa kelurahan jadi total lengkap 22 desa kelurahan itu bisa kita latih dan kita bimbing .”*(Wawancara 15 agustus 2025)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan PLKB Kecamatan krian menunjukkan program Elsimi di Kecamatan Krian dilaksanakan melalui sosialisasi, pelatihan, dan workshop yang terstruktur sejak 2021 hingga 2025, dengan 22 desa/kelurahan dibagi menjadi lima klaster agar seluruh wilayah memperoleh pembekalan dan pendampingan secara menyeluruh.



**Gambar 3.** Orientasi Tim Pendamping Keluarga

Sumber : Diolah Dari Wawancara Dengan PLKB Kecamatan Krian, 2025

Gambar 3. Diatas memperlihatkan bahwa proses komunikasi atau penyampaian informasi kepada para pelaksana dilakukan melalui orientasi yakni untuk memperkenalkan dan membimbing individu untuk beradaptasi dengan lingkungan, situasi, peran, atau konsep baru, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar, menentukan sikap yang tepat, dan memudahkan penyesuaian agar dapat beroperasi secara efektif di area tersebut. proses penyampaian informasi juga dilakukan melalui sosial media seperti yang disampaikan oleh Kader PKK Desa Sidorejo :

*“Untuk sosilisasi se ya kebanyakan ibu ibu tahunya dari posyandu atau dari kader tpk masing masing wilayah itu sebelum mereka pendampingan pasti ada izin ke wilayah masing masing. Insyallah kalo elsimil pun dari ibu hamil atau catin kan di sosial media insyaallah sudah banyak yang tau. jadi kalo dulu dari catin yang belom terdaftar kebanyakan kan 3 bulan sebelumnya kan mereka daftar nih din pak mudin ngge pak mudin yang membrikan arahan untuk mencari tim pendamping masing masing nah nanti tim ini yang akahn mengarahkan.insyallah semuanya kalo catin kebanyakan 90% sih sudah tau kalo ada elsimil.”* (Wawancara 18 Agustus 2025)

Sosialisasi program Elsimi di wilayah setempat terutama dilakukan melalui Posyandu dan kader TPK, dengan pemberitahuan kepada ibu hamil dan calon pengantin (catin) di setiap wilayah. Pendampingan diberikan setelah koordinasi dengan pihak terkait,

sehingga hingga saat ini sekitar 90% sasaran telah mengetahui keberadaan program tersebut.

Kedua, sebagaimana dikemukakan oleh George Edward III, kejelasan menjadi elemen krusial dalam kerangka implementasi kebijakan, yang menuntut penyampaian instruksi kepada pelaksana secara eksplisit agar kebijakan tersebut dapat terealisasi selaras dengan tujuan yang dirancang. Instruksi tersebut tidak hanya harus diterima, melainkan juga dipahami secara mendalam oleh para pelaksana. Komunikasi yang jelas dan presisi diperlukan untuk mencegah variasi interpretasi di antara pelaku implementasi. Selain itu, kebijakan hendaknya diuraikan secara rinci kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat menginternalisasi tujuan, target, serta substansi kebijakan, beserta langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kejelasan dalam aplikasi e-simil ini dapat difahami secara komprehensif oleh masyarakat luas. Hal ini didasarkan pada data wawancara yang dikumpulkan dari penyuluh KB Kecamatan Krian bahwa

*“Terkait dengan elsimil ini programnya kan sudah berjalan mulai dari 2021 ada jenjangnya ada tahapannya di lingkup masyarakat khususnya di desa sidorejo ini kita punya beberapa tim tpk pertimnya ini kita terdiri dari 3 orang yang memiliki sasaran sasaran jadi intinya terkait elsimil ini antara kader dengan sasarnya ini juga sesuai dengan apa yang sudah didapatkan pada waktu pelatihan selama ini. kita sudah berjalan di tahun ke 5 ini, kita juga sudah berjenjang jadi mulai di tahun pertama ini kita juga sudah sosialisasi ada pelatihan juga kaitannya dengan elsimil dan juga tpk kemudian untuk pembaruan elsimil ditiap tahunnya ini juga selalu kita sosialisasi dan juga pelatihan juga jadi kader ini terkait dengan updatenya elsimil ini juga pasti selalu update.”*

(Wawancara 15 Agustus 2025)

Program ELSIMIL di Desa Sidorejo telah berjalan sejak 2021 secara bertahap dengan pembekalan dan pelatihan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang beranggotakan tiga orang per tim. Setiap kader bekerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan mengikuti pembaruan serta pelatihan tahunan untuk memastikan pemahaman dan implementasi Elsimi selalu terkini.

Ketiga, menurut perspektif Edward III, prinsip konsistensi menuntut agar instruksi yang disampaikan melalui proses komunikasi tetap mempertahankan kestabilan dan kejelasan guna mendukung implementasi yang efisien. Variasi yang berulang pada instruksi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana di tingkat lapangan. Dengan demikian, konsistensi dalam mekanisme komunikasi menjadi elemen krusial. Ketidakstabilan dalam penegakan kebijakan dapat mendorong pelaksana untuk melakukan interpretasi dan aplikasi kebijakan secara fleksibel yang berlebihan, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian sasaran kebijakan publik. Dalam dimensi konsistensi ini, peraturan yang dirumuskan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan keambiguan bagi pelaksana, kelompok sasaran, serta pihak terkait. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kader PKK Desa Sidorejo.

*“Jadi sudah 3 atau 4 tahun ini elsimil itu kan sudah diberlakukan jadi di desa dan kecamatan itu sama harus ada kader tpk kader pendamping elsimil itu dikhususkan kayak untuk catin, ada ibu hamil tapi dulu sebelum 2025 ini untuk catin elsimil ini diharuskan karna untuk melan jutkan pernikahan harus ada sertifikat yang didapatkan dari elsimil, tapi ndak tau untuk tahun ini kok*

*tidak diharuskan. sebenarnya kita juga kan apa ya untuk aturan dari pemerintah sendiri itu tidak baku tidak baku itu berubah ubah kenapa kalo memang dulu diwajibkan sekarang tahun ini cuman dari surat dari puskesmas saja sudah cukup surat Kesehatan itu tapi tetep kita dari tpk tetap melakukan pendampingan kalo memang kita dapatkan data.”(Wawancara 18 Agustus 2025)*

Hasil wawancara dengan Kader PKK menyatakan program ELSIMIL telah diterapkan di tingkat desa dan kecamatan selama 3–4 tahun, dengan kader TPK bertugas mendampingi calon pengantin (catin) dan ibu hamil. Sebelumnya, sertifikat dari Elsimi menjadi syarat kelanjutan pernikahan, namun sejak 2025 persyaratan tersebut tidak lagi diwajibkan, digantikan surat keterangan kesehatan dari puskesmas. Meskipun demikian, TPK tetap melaksanakan pendampingan bagi individu yang terdata.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi terkait indikator komunikasi dalam proses penyampaian informasi yang efektif telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi workshop serta bimbingan teknis terhadap para kader tim pendamping keluarga. Selanjutnya dalam aspek kejelasan informasi sudah terlaksana dengan baik oleh tim pendamping keluarga di desa Sidorejo. implementasi aplikasi *Elsimil* di Desa Sidorejo masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi, khususnya dalam aspek konsistensi. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan pemahaman, penyampaian informasi yang tidak seragam, serta instruksi yang kadang berubah-ubah di antara pelaksana di lapangan. Inkonsistensi komunikasi ini menyebabkan kebijakan yang seharusnya dipahami dengan jelas oleh calon pengantin, kader, maupun tenaga pendamping keluarga menjadi kurang optimal. Temuan ini memiliki kesinambungan dengan studi oleh Septiyani dkk (2023) berjudul “*Evaluasi Efektivitas Sosialisasi Aplikasi Elsimil di Kota Metro*” [12]. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa minimnya sosialisasi sehingga masyarakat belum mengenal aplikasi dengan baik. Sementara itu, dalam penelitian ini kendala utamanya adalah inkonsistensi komunikasi antar pelaksana, meskipun sosialisasi telah dilakukan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan komunikasi dalam implementasi *Elsimil* dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik karena keterbatasan frekuensi sosialisasi maupun ketidakseragaman informasi yang disampaikan. Meskipun terdapat kendala dalam hal konsistensi penyampaian kebijakan, para kader serta tim pendamping keluarga masih mengupayakan untuk melakukan pendampingan terhadap calon pendamping jika mendapat laporan data dari pihak mudin desa Sidorejo.

### **Sumber Daya**

Sumber daya ialah elemen krusial dalam perealisasi kebijakan publik. Tanpa didukung sumber daya yang memadai, baik dalam hal keandalan maupun jumlah, sebuah kebijakan cenderung mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya, meskipun ketentuan dan regulasinya telah disampaikan secara jelas dan konsisten. Namun, jika pelaksana kebijakan tidak didukung oleh sumber daya yang memadai dan andal, maka efektivitas implementasinya akan menurun secara signifikan. Sumber daya ini meliputi berbagai elemen pendukung yang esensial untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, indikator utama sumber daya mencakup tenaga kerja, anggaran/dana, fasilitas peralatan, serta otoritas atau wewenang.

Pertama, tenaga kerja menjadi faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas tenaga kerja merujuk pada kemampuan, komitmen, profesionalisme, dan keahlian spesifik di bidang terkait, sedangkan kuantitas menunjukkan jumlah personel yang tersedia dan apakah itu memadai untuk menjangkau seluruh target sasaran. Edward III menyoroti bahwa peran tenaga kerja sangat menentukan, karena tanpa dukungan personel yang memadai, proses implementasi akan berlangsung lambat dan kurang efisien. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah pelaksana untuk pendampingan aplikasi ELSIMIL di Desa Sidorejo telah dinilai mencukupi, sebagaimana disampaikan oleh Penyuluh KB Kecamatan Krian.

*“Untuk jumlah tenaga pendamping sudah memadai, dari awal waktu kick ofnya elsimil ini 2021 kita mulai terlebih dahulu Adalah pendataan kaitannya dengan jumlah kadernya seberapa banyaknya nanti lingkupnya berapa besar wilayahnya berapa banyaknya rt rw nya seperti itu jangkauannya untuk tiap desa dan keluarahn itu jumlahnya sesuai dengan luas wilayahnya dan jumlah penduduknya kemudian juga beban Trget ditiap tiingkat desa atau keluarahan.”*

(Wawancara 15 Agustus 2025)

Berlandaskan informasi dari narasumber, sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendampingan oleh tim pendamping keluarga sudah dianggap memadai serta optimal. Berikut merupakan data jumlah tim pendamping keluarga yang sudah melakukan orientasi:

**Tabel 2.** Jumlah Tim Pendamping Keluarga Desa Sidorejo

Nama	Status Tim Pendamping	Pelatihan
<b>Bidan</b>	1. Ririn Andriyani	Sudah Orientasi
<b>PKK</b>	1. Ana Nurinda	Sudah Orientasi
	2. Ninuk Ribut	
	3. Titik Arifah	
	4. Siti Kiptiyah	
	5. Qori Dwi	
	6. Nuraini	
	7. Kristriana	
	8. Sri Susilowati	
	9. Endah	
	10. Luluk	
<b>Kader KB</b>	1. Rianing	Sudah Orientasi
	2. Enny Rohanah	
	3. Winarni	
	4. Karmini	
	5. Siti	
	6. Istianah	
	7. Supiah	
	8. Yeni	
	9. Rasmini Hari	
	10. Suyanti	

Sumber: Diolah Dari Wawancara Dengan PLKB Kecamatan Krian

Berdasarkan table 2. tersebut, dapat diketahui bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Sidorejo terdiri atas 21 anggota. Seluruh anggota TPK telah mengikuti kegiatan pembekalan atau pelatihan awal yang dilaksanakan pada tingkat desa. Pelaksanaan orientasi tersebut memberikan keseragaman pemahaman dasar bagi setiap anggota, sehingga mampu mengurangi potensi perbedaan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor di tingkat desa, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting sejak tahap pranikah.

Selain informasi yang telah disampaikan oleh penyuluh KB Kecamatan Krian, Hal Yang serupa juga disampaikan oleh Kader PKK Desa Sidorejo yang menyatakan :

*“Sebenarnya kalo untuk tim pendamping sih ya di sidorejo sendiri kan ada 21 tpk, disidorejo kan memang wilayahnya itu paling luas dibandingkan lainnya ada 14 rw dan 76 rt tapi insyaAllah untuk pembagian wilayah sudah saya kondisikan sama ppkbd jadi wilayah yang luas misalnya saya ini tidak mendampingi di wilayah saya sendiri saya harus keluar tapi insyaAllah sudah terkondisikan sewilayah sidorejo sudah ada tim masing masing”.* (Wawancara 18 Agustus 2025)

Hasil wawancara dan observasi Desa Sidorejo memiliki 21 anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah mengikuti pembekalan awal di tingkat desa. Pembekalan ini memberikan pemahaman yang seragam, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan stunting sejak tahap pranikah. Kader PKK Desa Sidorejo menambahkan bahwa pembagian wilayah pendampingan telah diatur bersama PPKBD, sehingga setiap TPK memiliki tugas wilayah masing-masing dan seluruh desa tetap terjangkau secara efektif.

Kedua, menurut Edward III, keterbatasan sumber pendanaan atau anggaran dapat memberikan dampak yang substansial terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan. Selain itu, Edward III menegaskan bahwa kekurangan anggaran ini juga akan menghambat keberhasilan pelaksana kebijakan, sehingga program-program terkait berpotensi gagal mencapai hasil yang diharapkan. sumber pendanaan berasal dari APBD dan APBN, Hal tersebut merujuk pada bentuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor kesehatan. Pernyataan ini diperkuat oleh data dan informasi dari Penyuluh KB Kecamatan Krian, beliau menjelaskan bahwa:

*“untuk anggaran ini kita APBD dan juga APBN jadi untuk APBD kita langsung murni dari Tingkat kabupaten kemudian untuk apbn dari pusat jadi kita setiap bulan setiap kader mendapatkan bantuan uang pulsa dan juga bantuan transport perbulan rutin tiap kader meendapatkan 2,5 dari pusat kemudian nanti didalemnya itu tiap kali pelatihan itu juga dianggarkan dari jenjang kabupaten dan juga dari pusat”.*(Wawancara 15 Agustus 2025)

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kader PKK Desa Sidorejo yang menegaskan bahwa anggaran khusus dari desa tidak tersedia, sehingga pendanaan untuk Tim TPK berasal dari tingkat provinsi maupun pusat, berikut ungkap beliau :

*“Kalo anggaran khusus dari desa tidak ada, karena untuk tim tpk in ikan langsung dari jawa timur insyaAllah jadi untuk kader tpk itu ada anggaran pulsa setiap bulan sama ada bantuan transport”.* (Wawancara 18 Agustus 2025)

Berdasarkan wawancara, pendanaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersumber dari APBD kabupaten dan APBN pusat, yang dialokasikan untuk tunjangan pulsa, transportasi bulanan, serta pelatihan. Desa tidak menyediakan alokasi anggaran khusus, karena seluruh pembiayaan disalurkan melalui pemerintah provinsi.

**Tabel 3.** Jumlah Anggaran TPK Desa Sidorejo

Jumlah TPK Desa Sidorejo	Nominal (Rp)
21	120.000
Total	120.000 x 21 = 2.520.000

Sumber: Diolah Dari Wawancara Dengan PLKB Kecamatan Krian

Berdasarkan data pada Tabel 3. diketahui bahwa jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Sidorejo berjumlah 21 orang. Setiap anggota TPK menerima insentif sebesar Rp120.000, sehingga total anggaran yang dialokasikan untuk keseluruhan TPK mencapai Rp2.520.000. Alokasi dana tersebut berfungsi sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap kinerja TPK dalam melaksanakan tugas pendampingan, khususnya dalam program pemerintah yang berfokus pada pendampingan calon pengantin, ibu hamil, serta upaya pencegahan stunting di tingkat desa.

Ketiga, Edward III mengemukakan bahwa dalam indikator sumber daya mencakup salah satunya aspek sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang utama keberhasilan implementasi. Sarana dan prasarana meliputi ketersediaan fasilitas, peralatan, teknologi, maupun infrastruktur yang dibutuhkan oleh pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya. Dengan ketiadaan sarana dan prasarana yang layak, proses implementasi akan terhambat meskipun komunikasi sudah jelas dan sikap pelaksana mendukung. Dalam aspek ini tampak pada ketersediaan perangkat teknologi seperti smartphone, komputer, jaringan internet, serta dukungan anggaran operasional yang memadai. Kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat digital, atau minimnya fasilitas pendukung di lapangan dapat mengakibatkan terhambatnya proses input data, pelaporan, maupun pendampingan calon pengantin. Dengan demikian, sarana dan prasarana menjadi elemen penting yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat berjalan efektif. Hasil wawancara yang telah di dapat dari Penyuluh KB Kecamatan Krian bahwa:

*“aplikasi ini kan aplikasi nasional ya elsimil ini jadi apa yang digunakan ngge seluruh Indonesia juga ngge satu pintu seperti itu kemudian ini kan penggunaan elsimil kan bareng bareng dengan kegiatan lain yang menggunakan aplikasi juga jadi kendalanya mungkin di server jadi kadang kita sudah menggunakan wifi ataupun paket data yang bagus juga kadang sering trouble atau gangguan aplikasinya juga bebarengan di server penggunaannya. ada sisi negatifnya dan juga positifnya kalo kita pake laporan online kita bisa lebih cepet lebih ringkes seperti itu kadang kala kendalane kita sudah melaporkan pas waktu mau dilaporkan ternyata terkendala jaringan. Ya mungkin kedepannya servernya bisa diperbaiki”.* (Wawancara 15 Agustus 2025)

Berdasarkan wawancara dengan PLKB Kecamatan Krian menjelaskan bahwa ketidakstabilan jaringan mengakibatkan aplikasi sering mengalami hambatan, seperti lambat diakses, gagal login, atau tidak bisa menyimpan data secara langsung. Kondisi ini membuat proses pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi tidak selalu dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sebagai konsekuensi dari keterbatasan tersebut,

pelaksana kebijakan seperti kader, bidan desa, maupun penyuluh KB tetap harus membuat laporan fisik/manual sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti administratif. Dalam perspektif teori Edward III, kendala jaringan ini mengindikasikan bahwa sumber daya sarana prasarana belum mendukung implementasi kebijakan secara optimal. sesuai dengan yang di ungkapkan Kader PKK Desa Sidorejo dalam hasil wawancara yang terkait aplikasi ELSIMIL yakni:

*“Memang kita secara kinerja harus ada fisik setiap bulan harusnya kalo memang sudah ada program elsimil kan tidak diperlukan lagi bukti fisik nah kenapa sekarang itu fisik masih diperlukan ya mungkin itu tadi lo njagani mbak kalo elsimil tidak bisa difungsikan jadi setiap bulan kita laporan juga secara fisik”.*(Wawancara 18 Agustus 2025)

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa alur kerja implementasi ELSIMIL menjadi kurang efektif karena petugas harus melakukan pekerjaan ganda, yakni menginput data ke aplikasi sekaligus membuat laporan fisik.

Keempat, menurut Edward III, pelaksanaan suatu kebijakan memerlukan kewenangan yang bersifat resmi. Kewenangan ini meliputi hak serta tanggung jawab pelaksana untuk menerapkan aturan yang telah ditetapkan melalui proses politik. Ketersediaan wewenang yang cukup untuk mengambil keputusan secara otonom akan berdampak signifikan terhadap efektivitas institusi dalam mengimplementasikan kebijakan. Kewenangan semacam itu menjadi sangat penting ketika institusi dihadapkan pada isu-isu yang menuntut respons cepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Krian, pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan calon pengantin melalui ELSIMIL di Desa Sidorejo, dijelaskan,

*“kan dalam program ini ada tugasnya masing-masing mbak, jadi gini kalau saya ini dengan ibu hartini selaku penyuluh kb itu lebih ke teknisnya atau peran strategisnya, kalau untuk tim pendamping keluarga itu mereka secara operasionalnya atau lapangan”.* (Wawancara 15 Agustus 2025)

Dalam program Elsimi, peran penyuluh KB bersifat strategis dan teknis, sedangkan Tim Pendamping Keluarga melaksanakan tugas secara operasional di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi aplikasi Elsimil, indikator sumber daya khususnya pada aspek sarana dan prasarana masih menghadapi kendala yang cukup berarti. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah keterbatasan jaringan internet atau server. Kondisi ini menyebabkan proses penggunaan aplikasi tidak selalu berjalan lancar, terutama ketika kader maupun tim pendamping keluarga melakukan input data secara real time. Kendala jaringan internet ini berdampak pada tertundanya proses pelaporan serta menurunkan efektivitas pelayanan yang diharapkan dapat diberikan secara cepat dan tepat. Meskipun pemerintah telah menyediakan sarana berupa aplikasi digital untuk mendukung pencegahan risiko stunting sejak tahap pranikah, namun keterbatasan infrastruktur jaringan menjadikan sebagian kegiatan masih harus ditopang dengan laporan manual. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya berupa sarana prasarana, khususnya akses internet, menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi aplikasi Elsimil di lapangan. Hasil ini linier dengan studi oleh Yunita dkk (2025) berjudul *“Efektivitas Penggunaan Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL)*

*Pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong” [13], menunjukkan bahwa keterbatasan jaringan dan kelemahan server merupakan masalah umum yang dihadapi dalam implementasi *Elsimil* di berbagai daerah. Perbedaannya terletak pada strategi yang dilakukan oleh pelaksana. Pada penelitian ini, solusi yang ditempuh adalah penggunaan laporan manual untuk memastikan data tetap terhimpun, sementara penelitian Yunita lebih menekankan pada hambatan teknis tanpa menyoroti alternatif yang dilakukan oleh pelaksana di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun program *Elsimil* telah memberikan inovasi dalam bentuk aplikasi digital, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan teknis yang bersumber dari keterbatasan jaringan internet. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar tujuan dari program dapat tercapai secara optimal melalui dukungan sarana prasarana yang memadai.*

### **Disposisi**

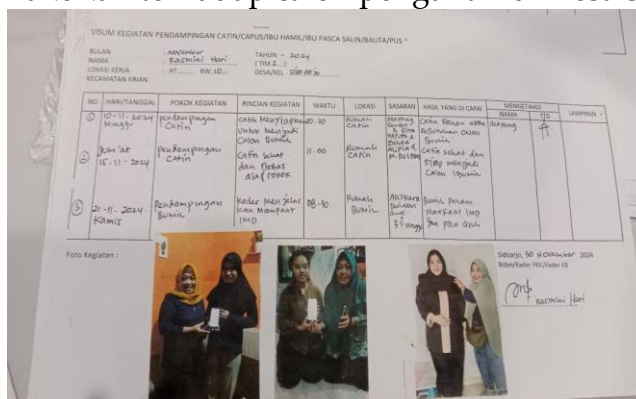
Disposisi menjadi faktor esensial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sikap dan sifat pelaksana kebijakan memainkan peran vital dalam mewujudkan tujuan serta target yang telah ditetapkan. Di antara sifat-sifat utama yang diperlukan oleh pelaksana kebijakan adalah integritas dan dedikasi. Integritas menjamin konsistensi pelaksana dalam mematuhi panduan program, sementara dedikasi yang tinggi memotivasi mereka untuk melaksanakan tugas, kewenangan, fungsi, serta tanggung jawab dengan antusiasme penuh dan sesuai ketentuan yang berlaku. Disposisi ini memiliki tiga elemen pokok, yakni interpretasi serta reaksi pada Tindakan, dan derajat dedikasi akan proses implementasi.

Sebagai elemen pertama, interpretasi yang mendalam tentang kebijakan harus ada pada keseluruhan pemangku. Menurut teori implementasi kebijakan publik dari Edward III, pemahaman merupakan salah satu komponen kunci yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pemahaman ini mencakup bagaimana para pemangku kepentingan dalam implementasi memahami tujuan, proses, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan. Hal ini meliputi kejelasan tujuan kebijakan, pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab, penguasaan prosedur serta mekanisme operasional, kemampuan koordinasi dan komunikasi, serta pengetahuan mengenai sumber daya yang tersedia. Dengan penguasaan aspek-aspek tersebut, pelaksana kebijakan dapat lebih efektif mencapai target yang dirancang, sekaligus mengantisipasi potensi hambatan yang mungkin timbul selama proses. Dalam konteks implementasi kebijakan pendampingan calon pengantin melalui Aplikasi ELSIMIL oleh Tim Pelayanan Keluarga (TPK) Desa Sidorejo, kesiapan petugas dalam menjalankan tugas serta kesigapan mereka dinilai telah mencapai tingkat yang memadai. Berdasarkan wawancara yang di dapat dari Kader PKK desa Sidorejo:

*“Jadi tugas kita itu untuk memberikan pencerahan memberikan edukasi fungsinya *elsimil* itu seperti apa karna disitu kan ada pertanyaan maksudnya untuk catin atau ibu hamil itu resiko seperti apa disitu nanti ada”.* (Wawancara 18 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kader PKK Desa Sidorejo, diketahui bahwa petugas lapangan memiliki peran aktif dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin dan ibu hamil mengenai fungsi serta manfaat penggunaan aplikasi *Elsimil*. Aktivitas

tersebut mencerminkan adanya disposisi dengan tingkat pemahaman yang baik, di mana petugas mampu menyampaikan tujuan dan konten aplikasi secara jelas dan terarah. Hal ini berdampak pada meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai risiko stunting serta urgensi pencegahannya sejak tahap pranikah. Adapun berikut merupakan bentuk pendampingan yang dilakukan terhadap calon pengantin di Desa Sidorejo.



**Gambar 4.** Pendampingan Catin

Sumber: Diolah Dari Wawancara Dengan PLKB Kecamatan Krian,2025

Dalam Gambar 4. Menerangkan bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Desa Sidorejo cukup berhasil dalam mendampingi calon pengantin (catin) menggunakan aplikasi Elsimil. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa catin yang telah mampu mengakses aplikasi secara mandiri setelah mendapatkan bimbingan dari TPK. TPK tidak hanya berperan sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai motivator bagi catin. Tim pendamping juga menjelaskan pentingnya pengisian data kesehatan pranikah di Elsimil sebagai dasar deteksi dini risiko stunting. Dokumentasi lapangan menunjukkan bagaimana kader TPK membantu catin mengunduh aplikasi, melakukan registrasi, hingga mengisi form kesehatan yang diminta. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pemahaman yang baik serta kesungguhan kader dalam memberikan arahan secara langsung maupun melalui pendampingan berulang. Hal ini menandakan bahwa pelaksana memahami secara teknis langkah-langkah penggunaan aplikasi.

Selanjutnya Indikator respons memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan melalui sikap positif dan kesediaan pelaksana untuk menjalankannya. Keberhasilan kebijakan bergantung pada dukungan penuh pelaksana tanpa perbedaan pendapat yang menghambat pelaksanaan. Respons ini mencakup cara pelaksana kebijakan, masyarakat, serta pihak terkait lainnya menyikapi kebijakan yang diimplementasikan, meliputi kepatuhan, kesiapan, adaptasi, umpan balik, dukungan, resistensi, dan interaksi. Respons yang optimal memungkinkan penilaian penerimaan serta pelaksanaan kebijakan di lapangan, sehingga pengambil kebijakan dapat melakukan intervensi tepat untuk meningkatkan keberhasilan implementasi. Berdasarkan wawancara, respons pelaksana dinilai cukup baik, dengan pemahaman yang memadai terhadap tugas dan kewajiban masing-masing. Penyuluh KB Kecamatan Krian menyampaikan bahwa :

*“saya terkait dengan elsimil ini ngge sangat sangat setuju karena didalamny elsimil ini sudah sesuai dengan materi apa yang harus dilaksanakan kaitannya kita dengan nasional pencegahan stunting, jadi ditahapan tahapan didalamny elsimil itu Adalah materi materi yang*

*wajib untuk disampaikan kepada calon pengantin oleh kader tpk kaitannya bagaimana cara mendampingi catin ini agar angka stunting niki khususnya untuk kecamatan krian dan desa sidorejo bisa diminimalisirkan. Alhamdulillah dari desa juga kita sudah melakukan pendekatan juga ke pihak desa, ke mudin desa, kemudian kita juga sudah berkoordinasi dan berkomunikasi juga di Tingkat pusat bkkbn dan kementriaan agama, jadi sudah sinkron terkait dengan elsimil ini wajib nanti setiap calon pengantin harus memiliki sertifikat dari elsimil ini untuk pendaftaran nikah di lingkup KUA kecamatan masing-masing, jadi untuk Masyarakat ini juga kalo masih ada kendala kebingungan biasanya nanti dari pihak kua dibantu juga dari pihak mudin untuk memberikan pengarahan kepada kader tpknya". (Wawancara 15 Agustus 2025)*

Berlandaskan diskusi tersebut, informan dari penyelenggara terlaksana cukup baik dan dapat dipahami dalam melakukan penugasan masing-masing.

Ketiga, Selain respons positif, komitmen pelaksana menjadi faktor penting dalam merealisasi kebijakan secara efektif. Menurut teori implementasi kebijakan publik Edward III, komitmen pelaksana menentukan keberhasilan implementasi dengan memastikan pelaksanaan selaras dengan ketentuan yang ditetapkan. Komitmen merujuk pada tingkat dedikasi dan kemauan pelaksana kebijakan serta pihak terkait untuk menjalankan ketentuan sesuai tujuan yang dirumuskan, mencakup dedikasi, motivasi, kepatuhan terhadap visi dan misi, kemauan mengatasi hambatan, stabilitas, konsistensi, dukungan pimpinan, serta kolaborasi. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, dapat diidentifikasi sejauh mana pelaksana benar-benar berkomitmen terhadap tugasnya, sehingga kebijakan dilaksanakan dengan semangat tinggi dan dedikasi penuh, yang pada gilirannya meningkatkan peluang keberhasilan implementasi. seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Lukman selaku Penyuluh KB Kecamatan Krian menyatakan:

*"tiap bulannya juga kita pada waktu diakhir bulan ada pelaporan kaitannya dengan elsimil yang online dan juga menggunakan laporan manual itu juga kita buat seperti posko pengaduan, jadi mungkin nanti kendala kendala apa bisa disampaikan kepada kita kalo seandainya kita berdua ndak bisa memberikan Solusi atau penjelasn kita bisa lanjutkan ke lingkup kabupaten juga ke Tingkat provinsi". (Wawancara 15 Agustus 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapkan oleh Kader PKK Desa Sidorejo dan Penyuluh KB Kecamatan Krian diatas dapat disimpulkan indikator disposisi dalam pelaksanaan program Elsimil di Desa Sidorejo menunjukkan tingkat yang cukup baik. Disposisi, yang mencakup sikap, minat, dan komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas, tercermin dari kesungguhan mereka dalam melaporkan kegiatan secara rutin setiap bulan, baik melalui aplikasi Elsimil maupun laporan manual. Para pelaksana, termasuk penyuluh KB, kader PKK, dan Tim Pendamping Keluarga, menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam menyelesaikan tugasnya, meskipun terkadang menghadapi kendala teknis. Jika ditinjau dari prespektif penelitian Choiriyah (2020) mengenai "penerapan *E-government* melalui aplikasi *M-Bonk* di Kabupaten Sidoarjo" [14], terdapat persamaan dalam hal pentingnya kesiapan pelaksana program. Pada penelitian tersebut menekankan bahwa kendala terbesar yang dihadapi *M-Bonk* adalah ketercukupan sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang belum memadai, sehingga pelaksanaan masih berada pada tahap persiapan dan pematangan.kendala utama terletak pada lemahnya dukungan

sumber daya manusia dan infrastruktur sehingga penerapan belum maksimal, maka dalam penelitian ini indikator disposisi justru menunjukkan hasil yang positif. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kesungguhan para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Secara keseluruhan, indikator disposisi dengan berbagai sub-indikatornya menunjukkan tingkat yang cukup baik, tercermin dari komitmen, tanggung jawab, dan kemampuan adaptasi para pelaksana, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki untuk mendukung kelancaran program.

### **Struktur Birokrasi**

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III, variabel terakhir merupakan struktur birokrasi. Struktur ini memainkan peran kritis dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara komprehensif, tidak hanya pada lembaga pemerintahan, tetapi juga pada organisasi swasta. Meskipun sumber daya implementasi telah tersedia, serta para pelaksana memahami dan berniat untuk menjalankannya, kebijakan tersebut tetap berpotensi gagal akibat faktor tersebut. kendala dalam susunan birokrasi. Kebijakan yang kompleks hanya dapat dijalankan melalui kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Struktur birokrasi yang tidak berhasil cenderung menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, pemahaman terhadap struktur birokrasi menjadi elemen krusial dalam studi realisasi kebijakan publik, yang ditandai oleh dua ciri utama fragmentasi dan prosedur operasional standar (SOP).

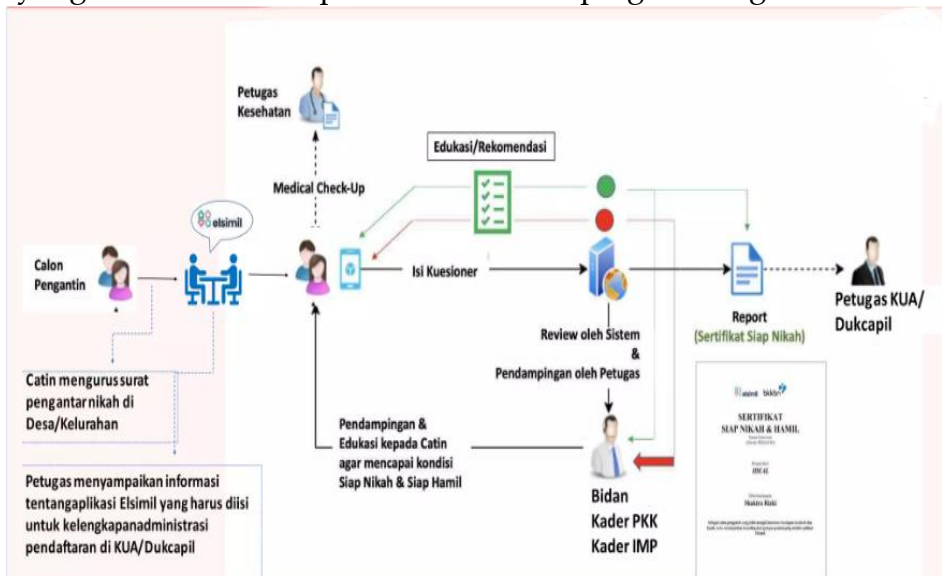
Pertama, penahapan yaitu pengelompokan kewajiban pada pelaksanaan rancangan atau aturan sangat vital untuk menjamin ketepatan spesifikasi pelaksanaannya. Pembagian ini dirancang agar tugas dapat dikelola secara lebih terfokus. Berdasarkan teori Edward III, fragmentasi bertujuan mendistribusikan tanggung jawab kegiatan pegawai ke berbagai unit kerja, sehingga dapat meredam pengaruh tekanan eksternal terhadap kebijakan serta meningkatkan efektivitas koordinasi. Tanpa koordinasi yang memadai, pencapaian tujuan kebijakan sering terganggu apabila pelaksanaan menyimpang dari peraturan yang berlaku. Kader PKK Desa Sidorejo menyampaikan:

*“jadi kalo elsimil ini didesa itu ada 22 insyaallah kader tpk disebar di semua wilayah yang ada didesa nah mereka itu tugasnya juga pendampingan khususnya di catin dan ibu hamil untuk pendampingannya, pelaporannya setiap bulan yang harus diserahkan ke ppkbd desal dari ppkbd nanti dilanjutkan ke plkb setiap kader harus ada pendampingan setiap bulan itu 12 itu meliputi catin ibu hamil baduta balita”.*(Wawancara 18 Agustus 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab tergolong cukup baik, karena setiap pelaksana memiliki pembagian tugas yang jelas dan alur koordinasi yang terstruktur dalam mendukung pelaksanaan program Elsimil.

Kedua, Standar Operasional Prosedur (SOP) memegang peran krusial dalam implementasi kebijakan, sebab berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten. Menurut teori implementasi Edward III, SOP mencakup serangkaian aktivitas terstruktur yang mendukung tenaga pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas harian sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga menjadi syarat

minimum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan gambar SOP berupa PDF yang telah dishare kepada Tim Pendamping Keluarga di Desa Sidorejo.



**Gambar 5.** SOP Pelaksanaan ELSIMIL

Sumber: Modul Aplikasi Elsimil

Dalam gambar 5. Memperlihatkan bahwa terdapat skema dokumen SOP pelaksanaan ELSIMIL yang dibagikan dalam format PDF kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa, sehingga dapat dikatakan bahwa SOP ini berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam pembentukan struktur birokrasi yang jelas. Dokumen yang dibagikan menunjukkan alur prosedur kerja, pembagian tugas, serta mekanisme koordinasi antarunit dalam implementasi program, sehingga memberikan panduan yang sistematis bagi TPK dalam menjalankan tugas pendampingan. Hasil wawancara dan observasi Aspek fragmentasi dalam struktur birokrasi program Elsimi di desa berjalan cukup baik. Tugas dan tanggung jawab antar pihak, mulai dari kader TPK, PPKBD, hingga PLKB, terdefinisi dengan jelas sehingga koordinasi lebih efektif dan alur kerja lebih terstruktur. Sementara itu, SOP yang diterapkan memberikan panduan jelas mengenai alur kerja, prosedur pendampingan, dan mekanisme pelaporan. SOP ini memastikan konsistensi pelaksanaan, dokumentasi yang rapi, serta pemahaman tugas yang sama di antara seluruh petugas. Pada penelitian Choiriyah (2020) mengenai “penerapan aplikasi M-Bonk di Kabupaten Sidoarjo” menunjukkan bahwa struktur birokrasi belum sepenuhnya siap, dengan kendala pada SDM, sarana prasarana, dan sosialisasi, sehingga efektivitas implementasi aplikasi masih terbatas [14]. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Elsimil di tingkat desa pada indikator struktur birokrasi telah berjalan cukup efektif, dengan pembagian tugas yang jelas antara kader TPK, PPKBD, dan PLKB serta SOP yang mendukung koordinasi dan pelaporan. Perbedaan ini menegaskan bahwa kesiapan birokrasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan aplikasi digital layanan publik. Secara keseluruhan, struktur fragmentasi yang terorganisir dan penerapan SOP yang konsisten mendukung efektivitas birokrasi dalam program Elsimil.

## Kesimpulan

Berlandaskan hasil pengkajian tentang implementasi aplikasi Elsimil dalam upaya pencegahan risiko stunting sejak tahap pranikah di Desa Sidorejo, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pelaksanaan aplikasi Elsimil berjalan cukup baik dan sesuai prosedur, dengan keterlibatan 22 anggota kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang konsisten melakukan pendampingan bulanan terhadap calon pengantin, ibu hamil, dan catin. Kedua, meskipun aplikasi mendukung proses pendampingan dan pelaporan, masih terdapat kendala terkait jaringan internet yang mengharuskan kader menggunakan laporan manual sebagai alternatif, sehingga menimbulkan fragmentasi dalam proses data. Ketiga, pembagian tugas dan wewenang antara kader TPK, PPKBD, dan PLKB sudah jelas, sehingga koordinasi antarlevel berjalan lancar. Namun, kendala sarana prasarana seperti jaringan internet dan keterbatasan perangkat mempengaruhi kecepatan dan konsistensi penginputan data. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur jaringan dan pelatihan berkelanjutan bagi kader TPK diperlukan untuk memaksimalkan efektivitas aplikasi Elsimil dalam upaya pencegahan risiko stunting.

#### Daftar Pustaka

- [1] World Health Organization, "Primary Health Care," World Health Organization, 2025. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/typhoid>. Accessed: Jul. 16, 2025.
- [2] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Jakarta, Indonesia, 2014. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38770/uu-no-36-tahun-2014>
- [3] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063, 2009. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- [4] Tim Percepatan Pencegahan Stunting, "Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)," Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, 2020. [Online]. Available: <https://stunting.go.id/stranas-p2k/>. Accessed: Jul. 28, 2025.
- [5] T. Lamangnida, W. K. Mohi, and D. F. Karim, "Gerakan Masyarakat Sadar Stunting Berbasis Smart Edukasi dalam Perspektif Pelayanan Publik Desa Ulanta Kabupaten Bone Bolango," Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 6, no. 1, p. 508, 2022. [Online]. Available: <https://share.google/FpCMoBqiM6aGhngCX>
- [6] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172, 2021. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>
- [7] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024," Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Jakarta, Indonesia, 2024. [Online].

- Available: <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2024/>
- [8] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Jakarta, Indonesia, 2001. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285449/inpres-no-6-tahun-2001>
- [9] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Jakarta, Indonesia, 2003. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147277/inpres-no-3-tahun-2003>
- [10] Turhindayani and A. Halim, "Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)," *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, vol. 4, no. 4, 2020, doi: 10.22146/abis.v4i4.59322.
- [11] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021–2024. Jakarta, Indonesia, 2021. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225346/peraturan-bkkbn-no-12-tahun-2021>
- [12] D. Septiyani, D. Y. Maritasari, S. E. Irianto, A. Karyus, and Wahyuningsih, "Evaluasi Efektivitas ELSIMIL dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dan Penurunan Stunting di Kota Metro," in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SNPPM-5)*, 2023. [Online]. Available: <https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm/article/view/177>
- [13] N. Yunita, N. M. M. Anjasmari, and Barakatullah, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong," *Jurnal Pelayanan Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 179–189, 2025. [Online]. Available: <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JPP/article/view/1046/834>
- [14] I. U. Choiriyah, "Penerapan *E-government* melalui M-Bonk di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2020. [Online]. Available: <http://eprints.umsida.ac.id/8508/2/5.penerapan%20e-government.pdf>
- [15] N. M. Anggriyani and I. G. A. A. Y. Dewi, "Efektivitas Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi (Studi Kasus: DPMPSTSP Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali)," *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 16, no. 1, pp. 82–92, 2025. [Online]. Available: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/18573/10576/87881>
- [16] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2014. [Online]. Available: <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>

- [17] S. E. E. van den Berg, J. A. Setiawan, A. H. Prasetyo, et al., "Understanding Cadre Coping Mechanisms in Utilizing Digital Tools for Stunting Intervention Programs," *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 21, no. 2, pp. 378–385, 2025, doi: <https://10.15294/kemas.v21i2.24587>.
- [18] I. I. Astuti, S. R. D. Br. Tarigan, and T. Stiawati, "Tantangan Penggunaan Aplikasi ELSIMIL bagi Calon Pengantin di Kecamatan Kasemen Kota Serang," *Publicness: Journal of Public Administration Studies*, vol. 4, no. 1, pp. 1–13, 2024, doi: <https://10.24036/publicness.v4i1.242>.
- [19] M. Azkia, M. Indriyanti, S. E. Ginanjar, R. Santa, and T. Maryulina, "Inovasi Pencegahan Stunting dalam Menggunakan Aplikasi ELSIMIL," *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 44–55, 2023, doi: <https://10.36917/japabis.v6i1.142>.
- [20] K. M. Nusantarie, H. R. Kartika, Y. Puspitasari, D. Prastyawati, L. S. Rismasinapa, and W. Apriliani, "Optimizing the Use of the ELSIMIL Application in Preventing Stunting Through Pocket Book Media at the Balowerti Community Health Center, Kediri City," *Journal of Community Engagement in Health*, vol. 7, no. 1, 2024, doi: <https://10.30994/jceh.v7i1.527>.
- [21] D. N. S. Arum, Masrif, A. Ismiyati, Sumarah, N. M. Pengge, and L. N. Wahyuni, "Strengthening Application-Based Digital Health Literacy in the Prevention and Management of Stunting among Mothers with Children Under Five Years of Age," *Jurnal Bidan Cerdas*, vol. 7, no. 2, 2025, doi: <https://10.33860/jbc.v7i2.4194>.
- [22] R. S. Malini, R. Gurusinga, S. Sitorus, M. Sinambela, and R. A. Sirait, "Smart Digital Education Model of Cadres Empowerment for Early Stunting Prevention," *Journal of Social Health and Development*, 2026, doi: <https://10.1177/22799036261423665>.
- [23] A. Fajarnita and Herlitawati, "Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Melalui Media Digital terhadap Pengetahuan Ibu tentang Pencegahan Stunting," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2023, doi: <https://10.55606/jurrikes.v2i1.1008>.
- [24] Y. W. Wang, A. Fadhil, J.-P. Lange, and H. Reiterer, "Integrating Taxonomies into Theory-Based Digital Health Interventions for Behavior Change: A Holistic Framework," *Digital Health*, vol. 5, pp. 1–18, 2019, doi: <https://10.1145/3270323>.
- [25] G. Vial, "Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda," *Journal of Strategic Information Systems*, vol. 28, no. 2, pp. 118–144, 2019, doi: <https://10.1016/j.jsis.2019.01.003>.